

FAKTOR - FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KEPUTUSAN PRESIDEN DONALD TRUMP MEMBATALKAN UNITED STATES - NORTH KOREA SUMMIT 12 JUNI 2018 DI SINGAPURA

Kesi Yovana, MSi

kesiyovana@dsn.moestopo.ac.id

Abstrak: Surat presiden Donald Trump tanggal 24 Mei 2018 yang membatalkan kehadirannya dalam pertemuan US-Korut 12 Juni 2018, setelah berulang kali memberikan sinyalmen positif akan berlangsungnya pertemuan, menimbulkan pertanyaan tentang faktor - faktor yang menjadi penyebab perubahan sikap mendadak ini. Sikap para petinggi Korut yang tidak konsisten dalam menjalankan komitmen dan rivalitas di Kawasan menjadi alasan pemicu keputusan mendadak Trump ini. Disamping masukan dari para penasihat dan kabinetnya.

Kata Kunci: Donald Trump, Korea Utara, Pertemuan

Abstract: President Donald Trump's letter on May 24th 2018 to cancelled his attendance in US-North Korea Summit June 12th 2018, after gave positive signals, growing questions about the factors that influenced this sudden decision. Inconsistency on the implementation of commitments by North Korean officials and rivalry in the region were the triggers of this Trump's decision, as well as, inputs from his advisers and officials.

Keywords: Donald Trums, North Korea, Summit

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanggal 27 April 2018 bertempat di DeMiliterized Zone (DMZ) kedua pemimpin Korea melakukan pertemuan untuk pertama kalinya dalam satu dasawarsa terakhir. Kim Jong Un menjadi pemimpin Korea Utara pertama sejak 1953 yang menginjakkan kaki di wilayah Korea Selatan. Jong Un sempat mengajak Moon melangkah masuk sebentar ke wilayah Korea Utara dan kemudian keduanya kembali ke sisi Korea Selatan untuk melanjutkan pertemuan. Dalam pertemuan di Wisma Perdamaian, Pamunjom disepakati 4 hal; (Redaksi Kumparan News, 2018)

1. Perdamaian, keduabelahpihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan melanjutkan proses menuju perdamaian. Wujud dari komitmen ini

adalah dengan melakukan sejumlah hal yaitu; penghentian propaganda menggunakan pengeras suara dan selebaran di DMZ mulai 1 Mei 2018, mengubah arena di perbatasan utara dan laut barat menjadi zona damai maritim, menghentikan provokasi di darat, laut dan udara, mengadakan pertemuan rutin antarpejabat militer termasuk menggelar Konvensi Militer pada bulan Mei 2018, Moon akan berkunjung ke Korut pada musim gugur 2018.

2. Reuni Warga, untuk menyambung kembali hubungan darah antar-Korea maka reuni dua keluarga yang terpisah akibat perang akan digelar pada hari Pembebasan Nasional tanggal 15 Agustus.
3. Denuklirisasi, sepakat untuk melakukan perculutan senjata nuklir secara bertahap sampai terciptanya Semenanjung Korea yang bebas nuklir.
4. Ekonomi, untuk meningkatkan kerjasama maka kedua Korea sepakat untuk sama-sama menempatkan kantor Hukum mereka di Gaeseong. Selain itu juga disepakati untuk menyambungkan rel kereta Korut - Korsel khususnya di koridor Seoul - Sinuiji.

Tanggal 10 Mei 2018 pasca dibebaskannya 3 orang warga negara Amerika Serikat yang selama lebih dari 1 tahun ditahan di Korea Utara atas tuduhan mata - mata, Presiden Trump kembali mengumumkan bahwa US-Korut Summit akan digelar tanggal 12 Juni 2018. Meskipun sempat memberikan harapan akan segera terwujudnya pertemuan antara kedua pemimpin ini, namun pada tanggal 24 Mei 2018 lewat surat yang dilayangkan oleh Gedung Putih, Amerika Serikat membatalkan secara sepihak rencana pertemuan tanggal 12 Juni di Singapura. Dalam suratnya Trump menyebutkan bahwa berdasarkan kemarahan terbuka yang disampaikan oleh Kim Jong Un baru - baru ini maka dirasa tidak tepat untuk melakukan pertemuan saat ini. Trump menyebutnya sebagai "peluang yang hilang" dan berharap bisa bertemu Kim suatu saat nanti. (Berlianto, 2018)

Maka menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengapa presiden Trump memutuskan untuk membatalkan US-DPRK summit 12 Juni di Singapura? Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi keputusan presiden Trump tersebut?

Disamping Memaparkan sejarah dan latar belakang pembicaraan damai Korsei-Korut 2018 penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan alasan – alasan dibalik mundurnya Amerika Serikat dalam rencana pertemuan dengan Korea Utara di Singapura pada 12 Juni 2018 melalui surat presiden tertanggal 24 Mei 2018. Sebagai hipotesa awal penulis menemukan bahwa terdapat faktor internal berupa saran – saran dari penasihat politik dan anggota kabinetnya, serta perilaku agresif dari Korea Utara sendiri yang mempengaruhi keputusan Presiden Donald Trump untuk membatalkan pertemuan di Singapura tanggal 12 Juni 2018.

Analisa Politik Luar Negeri

Menurut K.J Holsti, politik luar negeri ialah hasil kombinasi antara nilai-nilai dan sasaran dari suatu negara dengan informasi dari lingkungan dimana negara tersebut berada. Selain itu, menurut Holsti, kebijakan luar negeri suatu negara lebih difokuskan kepada tujuan utama kepentingan luar negeri negara itu sendiri. Ia menambahkan bahwa analisa kondisi suatu negara atau untuk memahami tujuan tertentu dari negara yang bersangkutan, suatu kajian mengenai politik luar negeri tersebut diperlukan. (Holsti, 1997)

Karakteristik dari politik luar negeri suatu negara memiliki orientasi atau tujuan tertentu. Holsti mengemukakan bahwa pemikiran mengenai politik luar negeri dibagi dalam 4 unsur. Ruang lingkupnya tersusun mulai dari yang bersifat umum dan dan khusus, yaitu: Orientasi politik luar negeri, peranan nasional, tujuan politik luar negeri dan tindakan.

Orientasi, peranan, dan tujuan politik luar negeri merupakan gambaran tentang susunan pemikiran pembuat kebijakan, sikap terhadap lingkungan internal dan eksternal, keputusan dan aspirasi. Politik luar negeri juga memiliki unsur tindakan atau sesuatu yang dilakukan aktor pemerintah terhadap aktor hubungan internasional yang lain untuk mencapai dan mempertahankan tujuan tertentu. Tindakan, pada dasarnya, merupakan bentuk komunikasi yang diharapkan mampu mengubah atau mempertahankan perilaku negara dan

menjadi terikat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh negara. Politik luar negeri adalah strategi atau perencanaan dan tindakan yang dibuat oleh elite politik atau pembuat keputusan dalam suatu negara. Keputusan tersebut merupakan hasil dari suatu proses pembuatan kebijakan tersebut disesuaikan dengan dinamika internasional dengan mempertimbangkan instrumen yang akan digunakan untuk mencapai tujuan nasional. (Holsti, 1997)

Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi lahirnya suatu keputusan kebijakan luar negeri, yaitu;

a. Pengaruh Global/Eksternal

Meliputi segala aktivitas yang terjadi diluar batas wilayah suatu negara yang mempengaruhi pilihan-pilihan yang diambil oleh para pembuat kebijakan dalam suatu negara. Seperti; aturan hukum internasional, keikutsertaan dalam aliansi keamanan, kerusakan lingkungan (deforestasi dan kelangkaan spesies hewan), serta perubahan tingkat perdagangan internasional. Tidak terkecuali perilaku - perilaku dari aktor hubungan internasional baik yang berada di kawasan maupun lintas kawasan. (Wittkopf, 2001)

b. Pengaruh Internal Negara

➤ Kapabilitas Militer

Jack S Levy mengatakan bahwa "state preparations for war strongly influence their later use of force." (Levy, Prospect Theory, Rational Choice, and International Relations, 1997) Akibatnya, meski negara - negara memiliki tujuan yang sama namun kemampuan militer mereka akan membatasi realisasi dari tujuan tersebut. Amerika Serikat sebagai negara pemilik kapabilitas militer terkuat di dunia saat ini punya keleluasaan lebih dalam membuat pilihan - pilihan kebijakan luar negeri dibandingkan negara lain yang mesti mempertimbangkan keberadaan negara tetangga yang lebih kuat darinya secara militer. Seringkali Amerika Serikat menggunakan kekuatan militernya ini untuk melakukan tekanan pada negara lain.

➤ Karakteristik Ekonomi

Secara umum, semakin maju sebuah negara secara ekonomi semakin besar peluangnya untuk berperan dalam ekonomi politik global. Kepentingan nasional negara - negara kaya bergerak jauh melewati batas wilayahnya dan mereka juga didukung oleh kemampuan untuk meraih dan melindunginya. Adalah sebuah konsekuensi logis ketika sebuah negara yang maju secara ekonomi akan memiliki kapabilitas militer yang besar pula. Terkecuali ketika negara tersebut berhasil mengakuisisi dan mengembangkan teknologi nuklir, seperti India, Pakistan dan Korea Utara.

➤ Tipe Pemerintahan

Meski secara realis diprediksi bahwa semua negara akan berperilaku sama untuk melindungi kepentingan nasionalnya, namun tipe pemerintahan yang dianut suatu negara akan mempengaruhi pilihan kebijakan yang akan diambil, berdasarkan analisa mereka terhadap apakah penggunaan kekerasan justru akan menimbulkan ancaman lebih dan apakah suatu ancaman tersebut sudah nyata atau belum. Disini akan terlihat perbedaan pilihan dan pertimbangan dari negara demokrasi dengan negara otokratik. Dalam negara demokrasi proses pengambilan kebijakan cenderung terbuka dengan melibatkan banyak pihak dalam pemerintahan. Sementara dalam negara otokratik keputusan cenderung berada ditangan pemimpin.

Namun dalam prakteknya fenomena elitism¹ juga terjadi di negara demokrasi. Keputusan hanya diambil oleh sejumlah elit yang berkuasa, terutama saat terjadi krisis internasional atau menghadapi situasi yang melibatkan kompleks industri militer.

c. Pengaruh Individu

Karakteristik pemimpin negara memiliki pengaruh yang besar dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Keyakinan, nilai - nilai yang dianut,

¹ Elitism merupakan sekelompok elit yang mengontrol kekuasaan dalam pemerintahan yang demokratis untuk kepentingan mereka sendiri. Masyarakat umum diberikan hak partisipasi tanpa kekuasaan, keterlibatan tanpa pengaruh.

pendidikan, pengalaman, lingkungan serta personalitas si pemimpin akan mempengaruhi persepsi, respon dan pilihan – pilihan kebijakan luar negeri yang dia ambil.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian eksplanatif. Pada tingkat eksplanasi penelitian ini termasuk kedalam penelitian asosiatif, yakni penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih untuk melihat pengaruh, yaitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan Presiden Trump (X) berpengaruh terhadap Keputusan Presiden Trump membatalkan US-North Korea Summit di Singapura (Y).

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif dimana hanya memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan beserta pola-polanya.

Cara pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Data didapat melalui sumber-sumber tertulis, dokumen-dokumen, buku-buku, artikel, surat kabar, dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan ini dipergunakan untuk menyeleksi data yang memiliki sebab akibat disamping juga menjelaskan masalah pada tempatnya.

PEMBAHASAN

Pada tahun 2016 terjadi percobaan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, negara tersebut mengujicoba bom hidrogen, dan seketika itu Amerika Serikat mengutuk tindakan tersebut, selanjutnya menyebut sebagai negara yang berbahaya. Bahkan dalam *National Strategic Defense Summary* 2018 secara jelas disebutkan bahwa Korea Utara merupakan sumber ancaman serius bagi Amerika Serikat dan sekutunya (Jepang dan Korea Selatan) di Asia Timur. Selain itu provokasi yang dilakukan oleh negara tersebut sudah sering dilakukan, pelbagai percobaan misil serta nuklir yang digencarkan telah dianggap sebagai ancaman yang secara langsung ditujukan kepada Amerika Serikat. Pasca uji coba nuklir Korea Utara

tahun 2017 yang daya ledaknya tercatat sebagai yang terbesar yang pernah ada, maka Amerika Serikat meningkatkan pertahanannya dengan menggelar THAAD di Korea Selatan.

Upaya pengembangan teknologi misil dan nuklir yang sedang dilakukan oleh negara ini, justru membawanya ke dalam konflik yang lebih dalam dan luas lagi. Negara-negara barat termasuk Amerika Serikat merasa terancam dengan perkembangan teknologi misilnya, sebab disinyalir sanggup mencapai daratan Amerika Serikat serta memiliki daya jelajah jauh. Amerika Serikat merasa khawatir terhadap ancaman yang ditimbulkan dari percobaan misil yang dilakukan oleh Korea Utara, lebih mengejutkan ketika intensitas peluncuran mengalami peningkatan ketika rezim baru dibawah Kim Jong Un berkuasa. Tidak hanya intensitas, namun juga daya jelajah serta cakupan yang lebih luas ditunjukkan melalui misil-misil barunya, bahkan terdapat misil yang termasuk dalam kategori ICBM (*Inter-Continental Ballistic Missile*) dengan daya jelajah lebih dari 5,500 Km. Rudal dengan daya jelajah diatas 5000 Km ini diprediksi dapat mencapai wilayah Amerika Utara, yang berarti berpotensi menghancurkan kota – kota di Pantai Barat Amerika Serikat. Sementara rudal Musudan yang berdaya jelajah hingga 2000 Km, berpotensi mencapai wilayah Amerika Serikat di Kawasan Samudera Pasifik (Guam). Tidak terkecuali Korea Selatan dan Jepang, sekutu dekat Amerika Serikat di Asia Timur.

Jangkauan Rudal Korea Utara

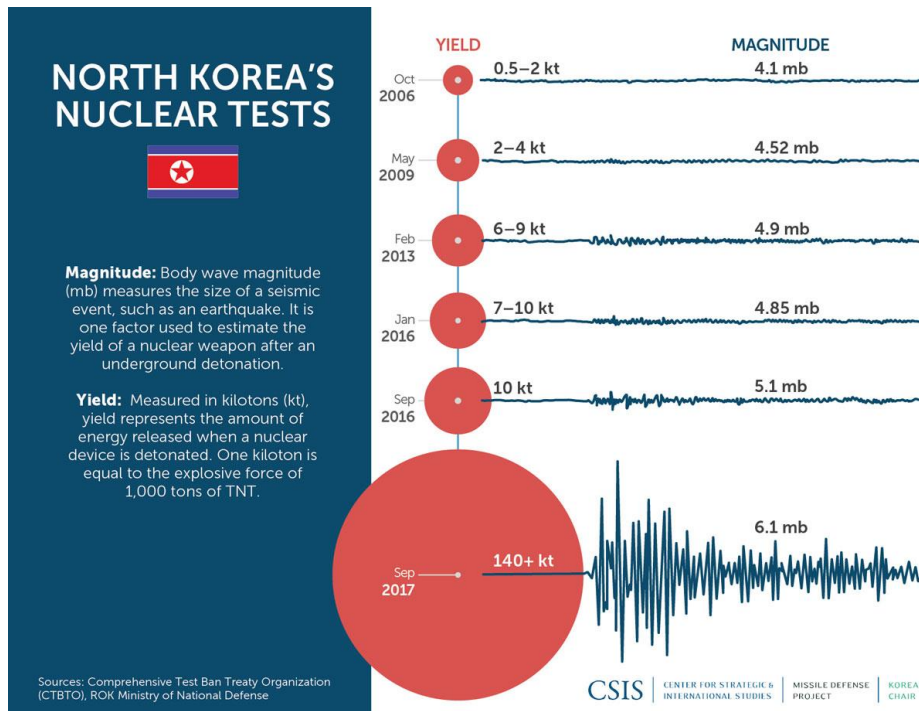
An ever-expanding range

The potential range of North Korea's current missiles, particularly the KN-14 and KN-08 missiles, would put most of the world in reach of its nuclear warheads.



Misil yang dikembangkan oleh Korea Utara memang sudah berada pada tahap mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat dan juga sekutunya di kawasan tersebut. Selain misil, nuklir juga turut dikembangkan oleh Korea Utara, nuklir yang termasuk dalam senjata pemusnah massal (WMD) kian membuat situasi dan kondisi bertambah pelik. Percobaan – percobaan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dengan pelbagai jenis nuklir, membuat Amerika Serikat dan sekutunya semakin terancam. Sejak 2006 hingga 2017 tercatat sudah 6 kali Korea Utara melakukan uji coba nuklir. Dari uji coba tersebut diketahui Korut tidak hanya melakukan ujicoba nuklir tapi juga uji coba bom hidrogen.

Daya Ledak Berdasarkan Kegempaan (Center for Strategic and International Studies, 2017)



Uji coba terakhir Korut tanggal 3 September 2017 berdasarkan daya ledaknya yang berhasil dicatat oleh seismograf CTBTO (*Comprehensive Test Ban Treaty Organisation*) diprediksi memiliki kemampuan lebih dari 140 kiloton atau 10 kalilipat bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki, yang kala itu menelan korban ratusan ribu jiwa.

Faktor - Faktor Eksternal yang Melatarbelakangi Kebijakan Pembatalan Summit oleh Presiden Trump

Terdapat dua faktor eksternal yang mendorong Presiden Donald Trump untuk memutuskan pembatalan pertemuan di Singapura tanggal 12 Juni 2018. Hal ini terkait sikap Korea Utara sendiri yang masih terkesan setengah hati dalam melakukan perlucutan senjata nuklirnya dan tuntutan Korea Utara agar dilakukan denuklirisasi secara penuh di Semenanjung Korea, yang mengarah kepada tuntutan untuk penarikan mundur pasukan Amerika Serikat dari Korea Selatan.

A. Belum Adanya Keseriusan Korut untuk Melucuti Secara Penuh Fasilitas Nuklirnya

Sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Pamunjom maka pada 12 Mei 2019 pemerintah Korea Utara lewat kantor beritanya Korean Central News Agency

(KCNA) mengumumkan bahwa mereka akan memulai proses perlucutan senjata nuklirnya dengan melucuti fasilitas uji coba nuklir di Gunung Punggye-ri antara 23 dan 25 Mei 2019. Perlucutan ini akan dilakukan dengan meledakkan seluruh terowongannya, menutup akses masuk, termasuk memindahkan seluruh fasilitas obsevasi, gedung laboratorium dan pos pengamanan. Semua proses ini akan dilakukan dibawah pengawasan lembaga atom internasional (IAEA).

Pengumuman ini disambut baik oleh pemerintah Amerika Serikat, khususnya presiden Donald Trump yang menyebutnya sebagai tindakan yang cerdas. *"Thank you, a very smart and gracious gesture! Thank you, a very smart and gracious gesture!"* (Christine Kim & David Brunsntrom, 2018) Sementara menteri luar negeri Mike Pompeo mengatakan bahwa terbuka peluang masa depan yang cerah bagi pemerintah Korea Utara jika mereka segera memusnahkan senjata nuklirnya. Pemerintah Korea Selatan juga menyambut baik pengumuman Korut ini dengan menyebutkan bahwa ini menunjukkan bukti kesediaan Korut untuk merealisasikan perlucutan senjata nuklir lewat tindakan, tidak hanya sekedar wacana. Dalam pengumuman yang disampaikan oleh KCNA tersebut tidak disebutkan mengenai undangan terhadap ahli dari Amerika Serikat dan Korea Selatan ke Pyunggye-ri sebagaimana yang dijanjikan pada pertemuan Pamunjom April yang lalu. Hanya media yang akan diberikan akses namun juga tidak disebutkan kapan.

Hasil Analisa citra satelit yang dilakukan oleh 38 North Project, The Henry L. Stimson Center, menemukan bahwa sejak 7 Mei 2018 proses perlucutan telah berlangsung di Pyunggye-ri. Sejumlah gedung yang menjadi pendukung operasional yang terletak diluar Portal Barat, Utara dan Selatan telah dirubuhkan. Rel - rel untuk lalu lintas kendaraan pertambangan yang menghubungkan terowongan - terowongan dengan tempat penimbunan juga telah dipindahkan. Bahkan sejumlah kendaraan tambang dan bangunan - bangunan kecil di sekitar lokasi juga sudah dibongkar. Gedung - gedung besar masih tetap ada yakni; *Command Center* dan *Main Administrative Support Area*. (Frank V Pabian, Joseph S Bermudez, Jr & Jack Liu, 2018) Tidak dirubuhkannya gedung -gedung utama menimbulkan keraguan dari sejumlah pihak khususnya Amerika Serikat akan kesungguhan Korut dalam melucuti program nuklirnya. Gambar 5.2

menunjukkan hasil citra satelit sebelum dan sesudah berlangsungnya proses perluasan di Pyunggye-ri.

Citra Satelit Lokasi Pyunggye-ri



Sumber: 38 North.org

Pihak intelejen Amerika Serikat juga meyakini bahwa Korea Utara hanya melakukan perluasan kecil di Pyunggye-ri. Hanya satu terowongan yang dirubuhkan, sementara terowongan lainnya masih tetap bisa digunakan. Keberadaan dua gedung utama yang masih tetap dipertahankan yakni gedung pusat komando dan gedung administratif, memungkinkan situs ini untuk sewaktu - waktu dioperasikan kembali. Bahkan satelit komersial Amerika Serikat menangkap adanya aktivitas di sekitar Portal Barat baru - baru ini. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat sendiri telah melakukan penghentian uji coba nuklir sejak tahun 1992, namun bukan berarti Amerika Serikat melakukan perluasan senjata nuklir secara penuh. Maka para ahli atom Amerika Serikat menginginkan Korea Utara untuk menutup reaktor yang memproduksi plutoniumnya dan membuka pintu pengawasan bagi proses pengolahan uraniumnya.

Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara Korea Utara dan Korea Selatan (dan Amerika Serikat) dalam menyikapi hasil - hasil dari Pertemuan Pamunjom 27 April 2019. Korea Selatan meyakini telah dicapai kesepakatan untuk Perlucutan Penuh senjata dan fasilitas nuklir yang dimiliki Korea Utara. Sementara pemerintah Korea Utara berkesimpulan bahwa denuklirisasi Kawasan Semenanjung Korea juga akan melibatkan penghentian segala bentuk provokasi dan ancaman militer dari Amerika Serikat sebagai sekutu dekat Korea Selatan.

Pandangan Korut, Korsel dan Amerika Serikat Terkait Isu Krusial di Kawasan Asia Timur (South China Morning Post, 2018)

Usulan	Korea Selatan	Korea Utara	Amerika Serikat
Denuklirisasi Semenanjung Korea	Ingin menghilangkan seluruh aktivitas nuklir di Korea	Akan menghentikan uji coba nuklir dan uji coba ICBM, serta melucuti fasilitas uji coba nuklirnya. Namun tidak menyebutkan tentang senjata nuklir yang dimiliki.	Ingin menghilangkan seluruh aktivitas nuklir di Semenanjung Korea
Perjanjian Damai Korea	Perjanjian damai untuk mengakhiri secara formal ketegangan bersenjata selama 65 tahun akan bias tercapai jika Korut melucuti senjata nuklirnya	Korut telah lama menginginkan kesepakatan damai dengan AS terkait perang Korea 1950-1953	Menyetujui lahirnya pernyataan bersama untuk perdamaian
Keberadaan Pasukan AS di Korsel	Korsel dan AS sepakat membentuk aliansi militer tahun 1953 dan tahun 2009 memperpanjang kerjasamanya	Korut memandang keberadaan pasukan AS di Korsel sebagai ancaman dan menuntut pemindahan	Menempatkan 30 ribu pasukan di Korsel untuk menangkal serangan Korut

Sanksi Ekonomi Terhadap Korut	Mendukung sanksi internasional namun tetap mengganggu dana untuk bantuan kemanusiaan	Menentang sanksi dan menyebut sanksi AS sebagai ancaman pecahnya perang	Mengancam perusahaan manapun yang mendukung nuklir Korut akan kehilangan bisnis dengan AS
-------------------------------	--	---	---

Perbedaan pandangan terkait isu krusial di Semenanjung Korea ini terutama soal denuklirisasi penuh dan keberadaan pasukan Amerika Serikat di Korsel dan Jepang membuat semua pihak saling menunggu respon dari pihak lain atas setiap aktivitas yang mereka lakukan. Dalam hal ini Korea Utara yang menganggap keberadaan pasukan Amerika Serikat di Kawasan sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya menginginkan adanya respon serius dari Amerika Serikat berupa penarikan pasukan menyusul perlucutan di Pyunggye-ri. Sebaliknya Amerika Serikat dan Korsel yang merasa terancam oleh keberadaan senjata nuklir Korut yang daya jelajah rudalnya telah mencapai wilayah Amerika Serikat di Guam, menganggap apa yang dilakukan oleh Korut belumlah menunjukkan keseriusan yang berarti dari pemerintahan Kim Jong Un. Mengingat masih terdapatnya ancaman serius dari senjata – senjata nuklir Korut.

B. Tuntutan Denuklirisasi Penuh di Semenanjung Korea

Sebagai aliansi, setiap tahunnya Amerika Serikat dan Korea Selatan melakukan latihan militer bersama guna meningkatkan kemampuan dan kesiapan pasukan dalam menangkal segala bentuk ancaman. Tanggal 11 Mei 2018 Korea Selatan dan Amerika Serikat memulai latihan militer gabungan tahunan yang diberi sandi Max Thunder. Latihan gabungan ini melibatkan Komando Operasi Angkatan Udara Korsel dan Armada ke-7 Amerika Serikat. Dirancang untuk menetralsir ancaman udara Korut melalui latihan perang udara ke udara. Sekitar 100 jet tempur diterjunkan dalam latihan ini termasuk delapan pesawat F-22 stealth dan pesawat pengintai U 2. Latihan ini dijadwalkan berlangsung sampai dengan 26 Mei 2018.

Digelarnya Max Thunder 2018 yang sempat tertunda akibat penyelenggaraan Olympiade Musim Dingin, direspon keras oleh pemerintah

Korea Utara. Korsel dianggap telah mencederai hasil kesepakatan Pamunjom terkait peredaan ketegangan di kawasan. Korut beranggapan penggelaran pasukan lewat latihan gabungan ini –khususnya kehadiran militer Amerika Serikat – telah memberikan ancaman serius terhadap keamanan Korut. Karnanya wakil menteri luar negeri Kim Gye Wan menyampaikan keputusan pemerintahnya untuk membatalkan pertemuan inter-Korea sebagai lanjutan dari KTT Pamunjom. Selain itu Kim juga mengancam akan mundur dari pertemuan di bulan Juni jika Amerika Serikat terus ‘menyudutkan’ Korut dan memaksa melakukan perlucutan senjata nuklir secara unilateral. Korut menginginkan agar Amerika Serikat juga melakukan penarikan mundur pasukannya dari Semenanjung Korea sebagai kompensasi atas kerelaan Korut untuk melucuti fasilitas nuklirnya di Pyunggye-ri.

Korut memiliki kekhawatiran yang besar terkait perlucutan senjata nuklir secara unilateral, belajar dari pengalaman Libya. Dibawah pemerintahan George Walker Bush, pada tahun 2004 Amerika Serikat pernah menjanjikan pencabutan sanksi terhadap Libya dengan syarat presiden Gaddafi melakukan penghentian program nuklirnya. Dan tujuh tahun kemudian pemerintahan Gaddafi tumbang lewat perang saudara dimana Amerika Serikat hadir sebagai pendukung kelompok oposisi Gaddafi. Pemerintah Korut mengkhawatirkan AS akan menggunakan strategi yang sama, mengingat John Bolton yang saat ini menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional (NSA) Amerika adalah orang yang sama yang mengarsiteki kejatuhan Gaddafi di Libya. (Anna Fifield, 2018)

Meningkatnya ketegangan pasca uji coba nuklir Korut September 2017, mendorong Amerika Serikat menggelar sistem pertahanan rudal balistik THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) di Korea Selatan. Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), yang sebelumnya bernama *Theater High Altitude Area Defense*, adalah elemen kunci dari sistem pertahanan rudal balistik atau *Ballistic Missile Defense System* (BMDS), yang dirancang untuk mempertahankan tentara AS, pasukan sekutu, pusat populasi, dan infrastruktur kritis dari serangan lawan. THADD buatan Lockheed Martin mampu mencegah rudal balistik jarak pendek hingga menengah, di dalam maupun di luar atmosfer. Sistem pertahanan rudal

berbasis darat ini dapat digunakan secara cepat, dengan mobilitas tinggi, dengan jangkauan pada rentang 200 km dan ketinggian hingga 150 km.

Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) System



Sumber: armyrecognition.com

Dalam pernyataannya wakil menlu Korea Utara, Kim Gye-gwan menegaskan bahwa Pyongyang dalam berbagai kesempatan sudah menyatakan bahwa prasyarat untuk dilakukannya denuklirisasi secara penuh di Semenanjung Korea adalah penghentian segala bentuk kebijakan anti Korut dan ancaman nuklir serta pemerasan oleh Amerika Serikat. Dengan kata lain, selama Amerika Serikat masih terus menekan Korut dan menempatkan militernya (termasuk armada nuklirnya) di Korea Selatan, maka perlucutan senjata nuklir secara penuh akan sulit dilakukan.

Saran National Security Adviser (NSA) dan Kementerian Luar Negeri

Amerika Serikat

Sejak dimulai putaran Six Party Talk tahun 2003 sampai dengan 2007 berbagai kemajuan berhasil diraih dalam setiap fasenya. Namun lagi – lagi pertemuan demi pertemuan ini gagal mencapai kata sepakat ketika berbagai insiden kemudian membuat Korea Utara maju mundur dalam menjalankan komitmen yang

disepakati. Keberhasilan Korut dalam mengimplementasikan kesepakatan yang dibuat pada Fase 1 perundingan putaran VI tahun 2007, berupa penutupan fasilitas nuklir Yongbon yang kemudian berhasil diverifikasi oleh pengawas IAEA, kemudian tidak diimbangi dengan penghargaan ataupun tindakan serupa oleh Amerika Serikat. Situasi ini kemudian memicu kemarahan pemerintah Korut yang puncaknya memutuskan mundur dari Six Party Talk tahun 2009.

Sikap kaku pemerintah Amerika Serikat pada masa berlangsungnya putaran Six Party Talk ini tidak lepas dari faktor pemerintah Amerika Serikat yang pada saat itu dikuasai oleh Partai Republik yang cenderung beraliran Hawkish (garis keras) dengan presidennya George Walker Bush. Putaran perundingan ini berlangsung ditengah gencarnya Amerika Serikat mengobarkan *War on Terrorism* dan melancarkan perang ke Afghanistan dan Timur Tengah. Sehingga dapat dipahami mengapa kebijakan Amerika Serikat pada masa ini cenderung menekan dan sulit untuk berkompromi. Khususnya terkait dengan proliferasi nuklir. Sejak awal pemerintah Amerika Serikat sudah pesimis bahwa Six Party Talk akan mencapai harapan dan Korea Utara akan mematuhi kesepakatan - kesepakatan yang dibuat. Terbukti ketika Korea Utara beberapa kali mundur dari perundingan dan bahkan melakukan uji coba nuklirnya pada tahun 2006. Meski sempat bersedia kembali ke meja perundingan, namun satu tahun kemudian Korea Utara kembali menarik diri dan 2 tahun kemudian melakukan uji coba nuklirnya yang kedua.

John Robert Bolton adalah seorang pensiunan militer yang kemudian menjabat sebagai staf kementerian luar negeri bidang pencegahan proliferasi nuklir pada masa pemerintahan George W Bush. Dialah yang banyak memberikan saran kepada pemerintahan Bush terkait dengan kebijakan nuklir Amerika Serikat khususnya di Timur Tengah dan Semenanjung Korea. Bolton juga yang mengusulkan agar Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Libya dan tidak akan mencabutnya sampai pemerintah Libya bersedia secara unilateral melakukan perlucutan nuklirnya. Bolton adalah seorang Hawkish nasionalis dan penganut Jacksonian sejati. Bolton tidak terlalu percaya dengan upaya memperjuangkan demokrasi. Dia cenderung meyakini penggunaan cara - cara militer sebagai alat respon yang utama. (The National Interest, 2018)

Pada pemerintahan presiden Donald Trump saat ini, John R Bolton kembali dipercaya oleh Trump untuk duduk di kursi National Security Adviser (NSA). Bolton termasuk orang pertama yang mengkritik keputusan Presiden Trump yang -secara impulsif- bulan Maret 2018 menyetujui akan melakukan pertemuan dengan Presiden Kim Jong Un pada Juni 2018, tanpa meminta saran dan pertimbangan dari para pembantunya. Bolton meyakini keputusan yang diambil Trump adalah sikap yang tergesa-gesa dan hanya akan melemahkan politik luar negeri Amerika Serikat. Bolton menekankan bahwa Korut mesti komit dalam melakukan perlucutan senjata sebagaimana yang dilakukan Libya tahun 2004 silam. Berulangkali Bolton menyampaikan bahwa Amerika Serikat menginginkan “a complete verifiable irreversible denuclearisation of North Korea” (denuklirisasi penuh yang tidak bisa dibangun kembali dan terverifikasi). (Anna Fifield, 2018)

Berpengalaman mengawasi proses perundingan di Six Party Talk, Bolton sejak awal meragukan komitmen Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi secara penuh. Sehingga ketika pemerintah Korea Utara mengkritik latihan militer gabungan AS - Korsel dan mengancam untuk menarik diri dari rencana pertemuan di Singapura, Bolton menganggap ini sebagai sesuatu yang sudah diprediksi. Dan dengan karakternya yang mengutamakan retaliasi untuk setiap ancaman terhadap eksistensi Amerika Serikat, maka bukan hal yang aneh kalau kemudian Bolton menyarankan agar Presiden Trump membalas tekanan Korea Utara dengan mengirimkan surat pembatalan US-North Korea Summit pada tanggal 24 Mei 2019. Terlebih pasca menyampaikan ancamannya Kim Jong Un kemudian melakukan pertemuan dengan Presiden China, Xi Jinping guna membahas perbaikan hubungan kedua negara dan bantuan ekonomi China untuk Korut. Terlihat bahwa Korut menggunakan China sebagai *backup* dalam diplomasinya terhadap Amerika Serikat.

Menteri luar negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Rendah (House of Representatives Foreign Affairs Committee) menyampaikan bahwa keberlangsungan summit berada di tangan Kim Jong Un. Namun Amerika Serikat tidak akan memberikan perhatian tanpa adanya imbalan yang signifikan; (BBC News, 2018)

Minggu, 20 Mei 2018 Trump meminta masukan dari Kementerian Luar Negeri dan *National Security Adviser* (NSA) terkait rencana pertemuan di Singapura. Dan pasca serangan yang dilakukan wakil menlu Korea Utara, Choe Son-hui pada 23 Mei 2018, yang menyebut wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence sebagai “a political dummy” karena menyarankan penggunaan ‘model Libya’ jika pembicaraan gagal mencapai kesepakatan, pada tanggal 24 Mei 2019 Presiden Trump berkirim surat pada Presiden Kim Jong Un yang pada intinya menyesalkan pernyataan – pernyataan penuh kemarahan yang beberapa waktu belakangan disampaikan pihak Korea Utara dan menganggap bahwa saat ini belum tepat bagi kedua pemimpin negara untuk melakukan pertemuan. (Patricia M Kim & Jeremy Fuller, 2018)

SIMPULAN

Penolakan Korea Utara untuk melakukan perlucutan senjata nuklirnya secara penuh dianggap pemerintah Amerika Serikat sebagai wujud dari kurangnya keseriusan Pyongyang dalam menjalankan komitmen yang telah disepakati. Terlebih dengan munculnya tuntutan – tuntutan dan kecaman dari pejabat Korea Utara terkait keberadaan militer Amerika Serikat di Korea Selatan, yang diikuti dengan ancaman Korut untuk mundur dari pertemuan di Singapura. Sikap ini dinilai pemerintah Amerika Serikat sebagai pengulangan dari pengalaman – pengalaman sebelumnya saat Korut juga mundur dari Six Party Talk, sehingga bias dipahami jika kemudian pemerintah Amerika Serikat memutuskan untuk membatalkan US-Korut Summit 12 Juni 2018 di Singapura.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, N. D. (2017). Explaining North Korea's Nuclear Ambitions: Power and Position on The Korean Peninsula. *Australian Journal of International Affairs*, 621-641.
- Anna Fifield. (2018, May 16). *North Korea expands threat to cancel Trump-Kim summit, saying it won't be pushed to abandon its nukes*. Retrieved from The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/world/north-korea-threatens-to-cancel-summit-with-trump-over-military->

drills/2018/05/15/04a15a5e-5878-11e8-8b92-45fdd7aaef3c_story.html?utm_term=.286d22a16ee9

BBC News. (2018, May 23). *Trump-Kim summit 'depends on Kim' - Mike Pompeo*. Retrieved from bbc.com: <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44227417>

Berlianto. (2018, Mei 24). *Lewat Surat, Trump Batalkan Pertemuan Dengan Kim Jong Un*. Retrieved from Sindo News: <https://international.sindonews.com/read/1308740/42/lewat-surat-trump-batalkan-pertemuan-dengan-kim-jong-un-1527176566>

Center for Strategic and International Studies. (2017, September). *Missile of North Korea*. Retrieved from Missile Threat CSIS Missile Defense Project: https://missilethreat.csis.org/wp-content/uploads/2017/09/North-Korea-Nuclear-Test_V1_reduced.jpg

Christine Kim & David Brunsntrom. (2018, May 12). *North Korea Details Plan to Dismantle Nuclear Bomb Test Site*. Retrieved from reuters.com: <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles/north-korea-details-plans-to-dismantle-nuclear-test-site-idUSKCN1ID0H5>

CTBTO. (2017, September 27). *DPRK Nuclear Tests*. Retrieved from Comprehensive Test Ban Treaty Organisation: <https://www.ctbto.org/the-treaty/developments-after-1996/2017-sept-dprk/>

David Nakamura and John Wagner. (2018, May 10). *The Washington Post*. Retrieved from washingtonpost.com: https://www.washingtonpost.com/politics/trump-announces-june-12-summit-in-singapore-with-north-korean-leader/2018/05/10/8f1ad3ac-5438-11e8-9c91-7dab596e8252_story.html?utm_term=.ecaebc2fe612

Frank V Pabian, Joseph S Bermudez, Jr & Jack Liu. (2018, May 14). *38 North*. Retrieved from 38north.org: <https://www.38north.org/2018/05/punggye051418/>

Holsti, K. (1997). *International Politics a Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.

Im, H. B. (2006). The US Role in Korean Democracy and Security since Cold War Era. *International Relations of the Asia Pacific (IRAP)*, 157-187.

Jeong, J. G. (2018, May 26). *CNN International Edition*. Retrieved from CNN: <https://edition.cnn.com/2018/05/26/asia/kim-jong-un-moon-jae-in-korea-intl/index.html>

- Kevin O'Driscoll, B. A. (2010). *Bomb, Sanction, or Negotiate: Understanding US Policy Toward North Korea*. Georgetown University.
- LANDLER, M. (2009, April 14). *North Korea Says It Will Halt Talks and Restart Its Nuclear Program*. Retrieved from New York Times:
<https://www.nytimes.com/2009/04/15/world/asia/15korea.html?ref=global-home>
- MOFAJP. (2007, October 3). *Ministry of Foreign Affairs of Japan*. Retrieved from mofa.go.jp: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party/action0710.html
- Patricia M Kim & Jeremy Fuller. (2018, May 25). *Can the Trump-Kim Summit Be Rescheduled?* Retrieved from cfr.org: <https://www.cfr.org/blog/can-trump-kim-summit-be-rescheduled>
- Redaksi Kumparan News. (2018, April 27). *Kumparan News*. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/@kumparannews/4-poin-penting-hasil-pertemuan-kim-jong-un-dan-presiden-moon-jae-in>
- South China Morning Post. (2018, May 16). *North Korea threatens to cancel Donald Trump-Kim Jong-un summit, suspends high-level talks with South Korea over military drills*. Retrieved from South China Morning Post:
<https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/2146294/north-korea-threatens-cancel-trump-kim-summit-and-suspends>
- The Guardian. (2018, May 24). *The Guardian News*. Retrieved from theguardian.com: www.theguardian.com/us-news/2018/may/24/trump-north-korea-letter-kim-jong-un-cancel-summit
- The National Interest. (2018, March 23). *John Bolton Is Back. And So Are His Dangerous Ideas*. Retrieved from nationalinterest.org:
<https://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/john-bolton-back-so-are-his-dangerous-ideas-25050>
- UNROCA. (2019, June 25). *Categories of Major Conventional Arms*. Retrieved from United Nations Register of Conventional Arms:
<https://www.unroca.org/categories>
- Wittkopf, C. W. (2001). *World Politics: Trend and Transformation*. Boston: Bedford/St. Martin's.